

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan pemegang saham. Pertumbuhan perusahaan dimasa depan menjadi harapan yang diinginkan oleh pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi perusahaan di masa yang akan datang adalah melalui peramalan yang akurat. Dalam laporan keuangan mengandung informasi yang berguna dalam rangka untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, salah satunya dengan pendekatan kinerja keuangan melalui analisis rasio.

Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengetahui apakah telah terjadi penyimpangan dalam melaksanakan aktivitas operasional perusahaan. Menurut Wild, dkk (2005 : 36) "Rasio merupakan alat untuk menyediakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari. Rasio merupakan salah satu titik awal, bukan titik akhir. Rasio yang diinterpretasikan dengan tepat mengindikasikan area yang memerlukan investigasi lebih lanjut".

Rasio keuangan sendiri terdiri dari 4 jenis yakni (a) rasio likuiditas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan membiayai operasi dan memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. (b) Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam

melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki. (c) Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil. (d) Rasio solvabilitas atau dikenal dengan *Leverage* adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. (Munawir, 2010: 238).

Fokus utama yang lebih krusial yakni mengenai rasio *Leverage* perusahaan sebab rasio ini menyangkut sumber dana yang akan digunakan dalam suatu kegiatan operasional perusahaan. Menurut Ardiyansah (2014: 16) bahwa *Leverage* merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang mempunyai kebijakan *Leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai kebijakan *Leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Salah satu bentuk rasio *Leverage* atau solvabilitas menurut Riyanto (2010: 333) yakni terdiri dari rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt To Equity Ratio* (DER). Namun fokus yang lebih dipilih yakni *Debt to Asset Ratio* (DAR), sebab rasio DAR merupakan suatu gambaran mengenai komposisi dari hutang dalam konstruk aktiva. *Debt to Asset Ratio* (DAR) merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur

perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila rasio ini tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasio ini rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2008: 56).

Salah satu aspek penting yang berkenaan dengan rasio *Leverage* yakni mengenai struktur modal. Rasio *Leverage* ataupun struktur modal, merupakan aspek rasio kinerja keuangan yang didasarkan oleh berbagai *theory* normatif dalam teori akuntansi. Salah satu teori tersebut yakni *Trade Off Theory* yang sebagaimana menurut Santhi dan Sujarni (2013: 680) bahwa *Trade off theory* menjelaskan bahwa perusahaan akan menerima perlindungan dari sisi pajak dengan menggunakan hutang yang diperoleh dari pembayaran beban bunga kepada kreditur.

Dalam penggunaan hutang tentunya terdapat pengorbanan yang disebut dengan beban bunga atau beban pinjaman. Bunga pinjaman merupakan beban yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Besarnya pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dapat dilihat dari rasio pajaknya. Semakin tinggi pajak yang ditanggung perusahaan, semakin besar daya tarik perusahaan untuk menggunakan hutang. Sehingga dengan demikian

dapat dikatakan bahwa dengan adanya pajak penghasilan yang besar, maka akan meningkat pula rasio hutang perusahaan sebab terdapat keinginan perusahaan untuk menurunkan pembayaran pajak yang dapat terlealisasi dengan perlindungan hutang.

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat pajak yang besar, maka perusahaan cenderung akan menggunakan hutang sebagai instrumen dalam struktur permodalan perusahaan. Pajak yang dimaksud dalam hal ini yakni pajak penghasilan perusahaan (PPh). Pajak penghasilan (PPh) menurut Muljono (2006: 27) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang pajak penghasilan mengatur mengenai subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang pajak penghasilan menganut asas materiil artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yaitu orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Undang- Undang Perpajakan Tahun 2008 Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT)

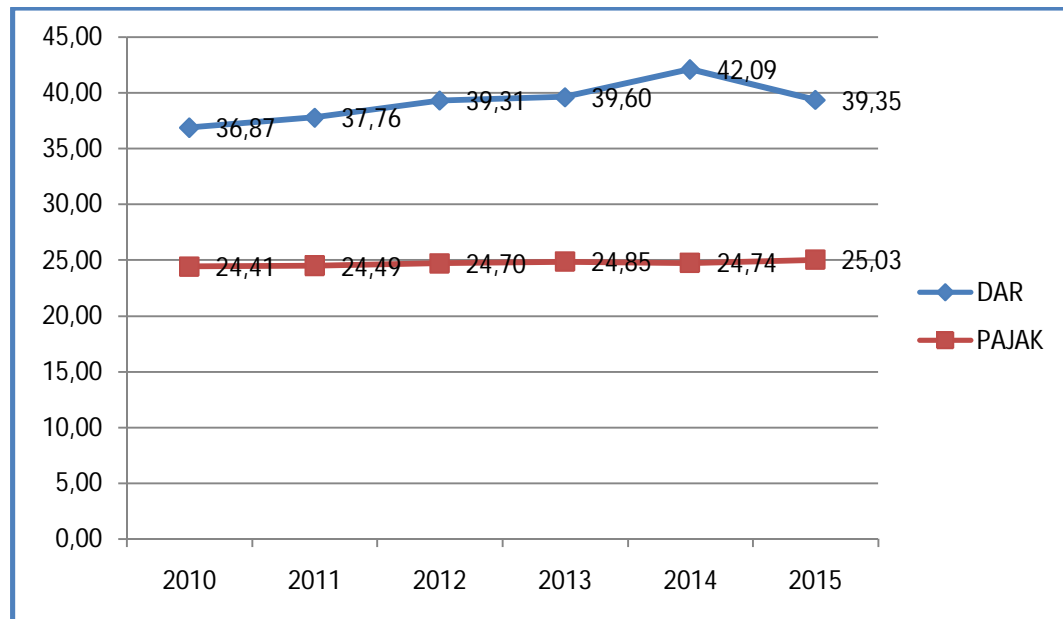
Pajak merupakan jumlah yang dibebankan kepada masing-masing perusahaan berdasarkan pada tarif pajak yang ditentukan pemerintah atas penghasilannya yang kena pajak yang diperoleh. Sementara Pajak juga merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan struktur modal suatu perusahaan. Keuntungan dari digunakannya utang yaitu adanya keringanan pajak atau penghematan pajak. Penghematan pajak merupakan besarnya pajak yang dapat dihemat perusahaan akibat dari digunakannya utang dalam struktur modal.

Menurut Brigham dan Houston (2006: 180) bahwa utang mempunyai keunggulan berupa pembayaran bunga dapat digunakan untuk mengurangi pajak sehingga biaya pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah. Keadaan inilah yang telah mendorong adanya penggunaan utang yang semakin besar di dalam struktur modal perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antara tingkat pajak dengan kebijakan *Leverage* perusahaan yakni positif (semakin besar pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah maka perusahaan akan cenderung

memilih pendanaan dari luar perusahaan atau dengan menerbitkan obligasi yang sifatnya sebagai hutang perusahaan). Namun tidak menutup kemungkinan pajak yang kecil maka perusahaan akan tetap meningkatkan hutangnya sebab ingin mendapatkan pembayaran yang lebih kecil lagi.

Terkait dengan kedua variabel yakni *Debt to Asset ratio* dan pajak penghasilan perusahaan, maka penelitian ini difokuskan pada perusahaan Manufaktur Sektor industri barang konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015. Pemilihan objek penelitian pada perusahaan tersebut didasarkan dari besarnya permintaan dari 5 sub sektor dari perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan rokok sebagai penyumbang defisit terbesar serta perusahaan makanan minuman, farmasi dan lain-lain yang tingkat permintaannya juga besar. Permintaan yang besar itu tentunya akan berdampak pada keberadaan saham perusahaan industri barang konsumsi sebagai saham defensif di mata investor

Berbagai masalah tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini, disamping itu terdapat pula masalah yang dapat ditinjau dari data keuangan Perusahaan Manufaktur Sektor industri barang konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia sebagaimana disajikan dalam Gambar 1 berikut ini:



**Gambar 1: Grafik Perkembangan Rata-Rata DAR Perusahaan Manufaktur Sektor industri barang konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan khususnya rasio DAR perusahaan dapat dikatakan dalam angka yang tinggi, hal tersebut karena selama 3 tahun terakhir hampir mendekati 50% yang dalam artian bahwa komposisi hutang perusahaan sangatlah besar. Untuk itu perusahaan harus memperhatikan nilai tersebut jika tidak ingin berada pada titik dimana hutang tidak memberikan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan sebagai akibat dari besarnya beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Disamping aspek permintaan yang besar dan sumbangan pajak yang besar. Masalah lain yang dihadapi oleh perusahaan tersebut yakni penggunaan hutang yang besar, padahal perusahaan Manufaktur Sektor industri barang konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Sehingga alangkah baiknya

perusahaan menggunakan instrumen laba khususnya laba ditahan sebagai modal untuk operasional kedepannya, sebab hutang pada dasarnya mengandung beban bunga yang besar.

Selain itu, pada salah satu sub sektor bahkan mengalami *Scam* atau kebangkrutan sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Perusahaan tersebut yakni PT Davomas Abadi Tbk. Sebagaimana diketahui bahwa Davomas International mengalami gagal bayar (default) bunga obligasi. Berdasarkan laporan keuangan PT Davomas Abadi bulan Maret 2009, utang bunga obligasi dolar yang harus dibayar oleh Davomas International kepada para pemegang obligasi sebesar AS\$13.090.000. Utang bunga itu jatuh tempo pada 8 Mei 2009. Java Investment dan Precise Circle sendiri termasuk pemegang obligasi dolar masing-masing sebesar AS\$100 ribu. Lantaran gagal bayar tersebut, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat menghentikan sementara (suspend) perdagangan efek PT Davomas Abadi pada 12 Mei 2009. Menurut BEI, suspend dilakukan terkait kegagalan pembayaran bunga atas 11 persen *guaranteed senior secured notes* sejumlah AS\$238 juta (www.hukumonline.com , dikutip tanggal 13 Februari 2016)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Penghasilan terhadap Kebijakan Leverage Perusahaan Manufaktur Sektor industri barang konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015”**



## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diidentifikasi masalah adalah:

1. Penggunaan hutang oleh Perusahaan Manufaktur Sektor industri barang konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015 sangatlah besar yang dampaknya pada pembayaran bunga yang menjadi beban perusahaan menjadi lebih besar.
2. Beberapa Perusahaan Manufaktur Sektor industri barang konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015 mengalami kebangkrutan dan keluar dari BEI sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam membayar hutang dan obligasi

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah pajak penghasilan berpengaruh terhadap kebijakan *Leverage* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan terhadap kebijakan *Leverage* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat teoritis

Diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan sumbangan yang positif terhadap ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut khususnya mengenai topik *Leverage* (DAR) terhadap pajak penghasilan.

### 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian terdiri dari:

#### a. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi investor dalam berinvestasi dengan melihat DAR dan pajak penghasilan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan industri barang konsumsi

#### b. Bagi Emiten

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan profitabilitas.

#### c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan

DAR dan pajak penghasilan pada perusahaan industri barang konsumsi.

d. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan sebagai bukti empiris di bidang keuangan perusahaan.

e. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai kebijakan hutang perusahaan dalam rangka untuk menurunkan pembayaran pajak.